

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2006

### Tersangka Kasus PLN Borang Bisa Ditahan Lagi

■ JAKARTA - Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Hendarman Supandji menegaskan, meski dua tersangka kasus korupsi PLN Borang telah ditangguhkan penahanannya, Kamis (29/6) kemarin, mereka tetap bisa ditahan lagi ketika penyidik menemukan alat bukti.

"Kalau ketemu alat bukti, bisa ditahan lagi," tandas Hendarman di Gedung Bundar, Kejaksaan Agung (Kejagung), Jumat (30/6), menyoal penangguhan penahanan Direktur Pembangkit Energi PLN Ali Herman dan Direktur Utama PT Guna Cipta Mandiri Yohanes Kennedy Aritonang. Penahanan keduanya ditangguhkan dengan membayar uang jaminan masing-masing Rp 500 juta. (din)

HUBUNGAN MASYARAKAT  
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN    FEB    MAR    APR    MEI    JUN <b>JUL</b> AGST    SEPT    OKT    NOV    DES 1 2 <b>3</b> 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN: 2										TAHUN 2006	

**Listrik di Sumbar Padam 2 Bulan**

**PADANG** - Sejak awal Juli hingga Agustus, Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan memadamkan listrik di Sumatra Barat secara bergilir. Ini akibat berkurangnya kapasitas produksi listrik, karena satu dari dua unit generator Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin, Sawahlunto, Sumbar terganggu. Humas PLN Wilayah Sumbar, Yusman Rajo Mudo mengatakan, tiap generator di PLTU Ombilin menghasilkan daya maksimal 100 megawatt (MW). (dte)\*\*

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA  
 INVESTOR DAILY  
 KOMPAS  
 KORAN TEMPO  
 MEDIA INDONESIA  
 PIKIRAN RAKYAT  
 RAKYAT MERDEKA  
 REPUBLIKA  
 SUARA KARYA

SEPUTAR INDONESIA  
 SUARA PEMBARUAN  
 SINAR HARAPAN  
 TABLOID KONTAN  
 THE JAKARTA POST  
 MAJALAH GATRA  
 MAJALAH TEMPO  
 MAJALAH TRUST

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 13

TAHUN 2006

# “Waste to Energy” Masih Dibahas

## Dada, “Konsep Itu bukan untuk Meniadakan Desentralisasi Pengolahan Sampah”

**BANDUNG, (PR).-**

Konsep pengelolaan sampah menjadi energi listrik (*waste to energy*) ditegaskan Wali Kota Bandung Dada Rosada, sebagai salah satu opsi yang saat ini masih dibahas untuk digolkan. Pembahasan itu, antara lain, dilakukan dengan PT PLN sebagai pembeli energi listrik yang akan dihasilkan.

“Itu kan baru rencana, bisa diubah kalau tidak *feasible*. Undang-undang saja bisa diubah, kenapa ini tidak,” kata Dada ketika dihubungi via telepon, semalam.

Seperti diberitakan, Gerakan Peduli Sampah (GPS) yang disebut-sebut diprakarsai tokoh lingkungan, Prof. Otto

Soemarwoto dan Acil Bimbo, menganggap konsep *waste to energy* hanya akan menghabiskan dana APBD Pemkot Bandung dan ujung-ujungnya dibebankan kepada masyarakat lagi.

Dada mengatakan, dengan konsep ini bukan berarti meniadakan desentralisasi pengolahan sampah oleh masyarakat melalui pengomposan. “Tapi, pengomposan itu tidak akan cepat menyelesaikan masalah. Yang penting, kebutuhan pabrik pengolahan adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi untuk menghindari musibah sampah terjadi lagi.”

Teknologi yang akan digunakan dalam pabrik yang akan

dibangun itu, bisa disesuaikan dengan potensi sampah Kota Bandung, kemampuan masyarakat, dan kemampuan pemerintah sendiri. “Asalkan, tujuan kita tetap *zero waste*,” kata Dada.

Peminjaman dana ke Bappenas sebesar Rp 630 miliar, lanjut Dada, berdasarkan penawaran Bappenas kepada Pemkot Bandung. “Mereka menawarkan, apa saja yang dibutuhkan Pemkot Bandung untuk menangani musibah sampah ini, bukan kita yang punya inisiatif,” ujarnya.

Mengenai sumber dananya, ia belum tahu pasti. “Bisa jadi dari dana bantuan pemerintah pusat, bisa hibah, atau lainnya, itu belum ditentukan,” katanya.

Selain meragukan konsep *waste to energy*, GPS juga merekomendasikan untuk mengubah bentuk kelembagaan pengelolaan sampah. “Sebaiknya pemkot punya dinas sebagai regulator dan pelaksanaannya bisa diserahkan ke swasta yang profesional,” ujar Ir. Cecep Rukmana, dalam konferensi pers di Hotel Panghegar, Sabtu (1/7).

GPS berharap, perusahaan swasta berisikan tenaga-tenaga yang kompetensi dan dedikasinya tinggi serta dibayar secara baik. “Saya dengar gaji pegawai PD Kebersihan itu lebih kecil dari pegawai negeri,” katanya.

Akhir-akhir ini, banyak unsur swasta yang menawarkan teknologi pengolahan sampah. Tapi, kalau biaya yang dibutuhkan terlalu mahal, ia ragu pemerintah dan masyarakat bisa membayarnya. “Oleh karena itu, tetap saja perlu dicari teknologi yang murah,” katanya.

Pada kesempatan lain, Ketua Harian Panitia Anggaran DPRD Kota Bandung, H. Lia Noer Hambali, S.P., juga mengusulkan agar manajemen dan sumber daya manusia pada PD Kebersihan direvitalisasi. “Selama ini, PD Kebersihan itu salah kelola, manajemen dan SDM-nya harus dirombak,” katanya.

Menurut Lia, PD Kebersihan selama ini tidak layak lagi dipimpin oleh seorang pegawai negeri, melainkan akan lebih baik diserahkan kepada unsur profesional. “Serahkan saja pada kalangan profesional dalam pengelolaannya,” ujarnya.

Pendapatan yang diperoleh PD Kebersihan pada 2005, dianggarkan Rp 30,5 miliar, yang terealisasi Rp 30,3 miliar. “Kurang hampir Rp 420 juta dari yang dianggarkan. Sedangkan biaya yang dikeluarkan pada tahun itu mencapai Rp 33,6 miliar. Merugi kurang lebih Rp 3,3 miliar,” kata Lia. (A-156)\*\*\*

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input checked="" type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <b>JUL</b> AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: A.18		
TAHUN 2006		

# Direktorat Listrik Ngotot Bangun PLTU

Menteri Energi menilai proyek itu ambisius.

JAKARTA — Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi berkeras akan tetap melanjutkan pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) 10 ribu megawatt hingga 2009.

Menurut Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Yogo Pratomo akhir pekan lalu, pihaknya siap menjalankan proyek darurat pembangunan pembangkit listrik batu bara. Bila semua kendala, seperti pendanaan, penyediaan tanah, serta jalur transmisi dan distribusi, dapat diatasi, proyek tersebut bisa selesai pada 2009.

Pernyataan Yogo bertolak belakang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro. Sebelumnya, Purnomo di Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin pekan lalu menyatakan megaprojek listrik 10 ribu MW sebagai proyek am-

bisius. Dia pesimistis proyek tersebut dapat terlaksana dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun.

Menurut Purnomo, banyak kendala yang harus diselesaikan untuk membangun proyek listrik senilai US\$ 5,7 miliar tersebut. Kendala tersebut antara lain masalah lahan serta pembangunan transmisi dan distribusi.

Bahkan Direktur Transmisi dan Distribusi PLN Herman Darnel Ibrahim dalam nota dinas pada 16 Juni lalu menilai rencana pembangunan pembangkit 10 ribu MW tidak mungkin selesai pada 2009.

Dalam suratnya, Herman mengatakan masih terbatasnya kemampuan eksekusi proyek, baik sumber daya manusia, alat kerja, penyambungan, maupun penjualan, dalam satu tahun. Selain itu, kata dia, pendanaan transmisi dan distribusi belum ada kepastian.

Herman, yang pernah terlibat dalam proyek sekam padi, menyebutkan realisasi beban pun-

cak Jawa-Bali 14.360 MW. Angka tersebut lebih rendah daripada tahun lalu, sebesar 14.821 MW. Dari sisi manajemen, dengan menerapkan *demand side management*, ada potensi menurunkan daya 800 MW di Jawa-Bali.

Dengan skenario rendah itu, di Jawa-Bali hingga 2009 diperlukan pasokan tambahan 1.000 MW untuk mengganti penggunaan bahan bakar minyak, dan pada 2010 ditambah 1.500 MW. Untuk luar Jawa-Bali, hingga tiga tahun ke depan, hanya dibutuhkan 1.000-1.500 MW dan pada 2010 diperlukan 500-700 MW.

Kepada *Tempo*, Yogo mengatakan, akan berupaya mengatasi kendala agar proyek pembangunan pembangkit batu bara bisa diselesaikan tepat waktu. Tentang nota dinas Direktur Transmisi dan Distribusi PLN yang meragukan proyek tersebut, dia mengaku tidak tahu-menahu. "Itu urusan internal PLN. Kami siap (menyelesaikan megaprojek)," katanya. ● ALI NUR YASIN | MUHAMAD FASABENI

A.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- 

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN **JUL** AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 3

TAHUN 2006

## PLTN Pertama RI Beroperasi Tahun 2016

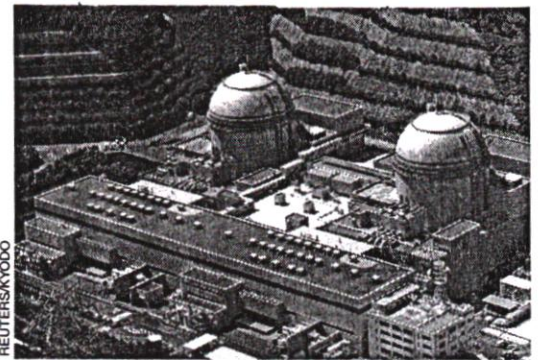
**BANDUNG** – Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama di Indonesia yang berlokasi di Semenanjung Muria, Jepara, Jawa Tengah, diperkirakan mulai beroperasi pada 2016. Pembangunan PLTN tersebut sesuai Peraturan Presiden (Perpres) No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi. Sebagai sumber energi ideal untuk pembangkit listrik, nuklir dinilai lebih efisien daripada bahan bakar fosil.

"BATAN telah selesai melakukan studi tapak dan kelayakan di tiga lokasi. Yakni Ujung Watu, Ujung Lemah Abang, dan Ujung Grenggengan. Lokasi paling tepat untuk pembangunan PLTN adalah Ujung Lemah Abang. BATAN telah melakukan pengecekan, pendataan, sekaligus penelitian terhadap aspek geologi serta ekonomi di wilayah itu," tutur Kepala Bidang Promosi Pusat Diseminasi Iptek Nuklir Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Dedy Miharja di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) baru-baru ini.

Untuk lebih memastikan kesiapannya, Dedy mengungkapkan, ketiga lokasi tersebut juga telah menjalani kajian ulang selama lima tahun sejak 1991 dari perusahaan Jepang, New Jack Corporation. Lebih dari itu, kajian ulang juga dilakukan PT Rekayasa Industri yang bekerja sama dengan sebuah perusahaan Australia. Tentang keamanan lokasi, Dedy memaparkan, tempat pendirian PLTN harus jauh dari permukiman penduduk. Lokasi yang menjadi kandidat kuat tempat pembangunan PLTN pertama Indonesia itu berada di sebuah perkebunan kelapa yang jauh dari permukiman penduduk.

Dedy menyatakan, keputusan pembangunan PLTN tersebut sesuai Perpres No 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan Energi. Di sana disebutkan bahwa pada 2025 kelak, Indonesia diharapkan telah memiliki kontribusi nuklir sebagai sumber energi sebanyak 5%. PLTN pertama Indonesia direncanakan memiliki empat reaktor untuk membangkitkan listrik.

Saat ini Indonesia telah memiliki sejumlah reaktor nuklir. Namun, reaktor-reaktor tersebut adalah reaktor riset yang ditujukan untuk keperluan penelitian. Sebuah reaktor nuklir berdaya 200 megawatt berada di Bandung. Reaktor lainnya yang berada di Yogyakarta memiliki daya 100 kilowatt, dan reaktor bertenaga paling besar saat ini berada di Siwabesi, Serpong, dengan daya 300 megawatt. (yogi pasha)



**PENDAMPING:** PLTN Oi di Fukui, Jepang. Indonesia diharapkan memiliki PLTN pada 2016. Nuklir merupakan sumber energi alternatif yang dapat menjadi pendamping sumber energi lain yang sudah ada.

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input checked="" type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <u>JUL</u> AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 4		
TAHUN 2006		

KARYAWAN PLN MINTA BOS BARU

“Nunggu Eddie Widiono Kelamaan”

Jakarta, RM

Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mengecam rencana pemerintah untuk menambah posisi di jajaran direksi seperti Wakil Dirut dan direksi lainnya.

Bola penambahan jajajam direksi dilemparkan Komisaris Utama PLN Alhilal Hamdi. Usai acara acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PLN Selasa (27/6), Alhilal menyatakan, pihaknya akan mengkaji kemungkinan untuk menambah beberapa posisi di jajaran direksi PLN.

Opsi pertama, kata Alhilal, karena banyaknya masalah hukum yang dihadapi PLN, direncanakan akan ada pejabat eselon I semacam divisi hukum serta Deputi Direktur Perencanaan. Opsi kedua, membentuk Direktur Perencanaan dan pengembangan. Dan opsi terakhir adalah adanya posisi Wakil Dirut atau semacam *Chief Operating Officer* (COO) yang khusus menangani transmisi, distribusi, pembangkitan dan niaga.

Menanggapi pernyataan Alhilal, Ketua Umum DPP SP PLN Ahmad Daryoko menyatakan, pengangkatan Wakil Dirut merupakan pemborosan keuangan perusahaan. “Dengan adanya jabatan direksi baru, perusahaan harus mengeluarkan dana tambahan berupa gaji serta tunjangan jabatan direksi,” tegas kepada *Rakyat Merdeka* di Jakarta, kemarin.

Dia mengkhawatirkan, pengangkatan wakil Dirut PLN ini merupakan skenario atau akal-kalan dari segelintir orang-orang tertentu untuk mengakomodir kepentingannya memasukkan orang-orang non profesional dalam jajaran direksi PLN. “Jangan-jangan penambahan jabatan hanya untuk mengakomodir suatu kepentingan politik tertentu.

SP PLN menolak calon direksi dari kalangan politisi dan terlibat KKN,” tegasnya.

Menurutnya, tidak ada hal baru dari opsi yang akan dibuat pemegang saham tersebut. Sebab, Divisi Hukum maupun Direktur Perencanaan sudah ada sejak era direksi-direksi PLN lama. Hanya saja, sejak PLN dipimpin Eddie Widiono selaku Dirut, jabatan Direktur Perencanaan itu dihapus.

**Rombak Direksi**

Dia menekankan, pihaknya tetap mendesak pemerintah untuk segera menggelar RUPS Luar Biasa (RUPSLB) untuk merombak direksi dan mengganti Dirut PLN. “SP meminta bukan hanya mengganti



Eddie Widiono. Foto: Zamri

direksi, tapi manajemen PLN juga harus dirombak,” ungkapnya.

Menurut Daryoko, perombahan direksi PLN perlu dilakukan karena setiap kebijakan yang diambil Direksi PLN misalnya untuk kontrak pembangunan pembangkit listrik baru dan lain-lain, diputuskan dalam rapat direksi, sehingga semua direksi ikut bertanggung jawab. “Apalagi, sekarang direksi yang masih aktif tinggal tiga orang, jadi sudah pincang sekali,” katanya.

Dia menyebutkan alasan mengapa Eddie Widiono perlu di non-aktifkan bahkan harus diganti: Sebab, dengan adanya tindakan hukum dan penetapannya sebagai tersangka serta statusnya sebagai

tahanan, sudah merupakan halangan tetap.

“Penonaktifan pejabat PLN dimaksudkan agar yang bersangkutan dapat berkonsentrasi dalam pemeriksaan perkara dan tidak terbebani hal-hal lain yang memungkinkan memperparah kondisi fisik/mental yang bersangkutan, serta demi kelancaran operasional PLN,” jelasnya.

Sekjen SP PLN Yunan Lubis mengingatkan bahwa terlalu lama kalau menunggu putusan tetap status hukum Eddie Widiono. Untuk memproses suatu perkara agar seseorang tersangka sampai mempunyai kekuatan hukum tetap, setidaknya memakan waktu lima tahun.

“Habis saksi, sebagai tersangka, kemudian ke Kejaksaan, diproses menjadi terdakwa untuk di Pengadilan Negeri (PN). Kalau di PN terbukti bersalah, terpidana bisa banding, kemudian kasasi di Pengadilan Tinggi dan terakhir meminta Peninjauan Keputusan (PK) dari Mahkamah Agung (MA). Ini kan minimal memerlukan waktu lima tahun. Apakah Pelaksana tugas (Plt) Dirut PLN itu harus menunggu kepastian hukum tetap,” tukas Yunan.

“Kalaupun nanti terpidana diputuskan tidak bersalah sehingga namanya bisa direhabilitasi, apakah mungkin harus kembali menduduki jabatan Dirut,” ucap Yunan kembali bertanya. ■ MAF

MONITOR BERITA

<input type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input checked="" type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>	
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <b>JUL</b> AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 22		
TAHUN 2006		

# Krisis Listrik Ancam Sumatera Debit Air Terus Menyusut

**'Penyusutan debit air pada tujuh PLTA akibat kemarau menyebabkan produksi listrik berkurang.'**

**PALEMBANG (Media):** Tujuh pembangkit listrik tenaga air (PLTA) milik PT-PLN tidak berfungsi maksimal karena debit air terus menyusut akibat kemarau. Dikhawatirkan lima provinsi di Pulau Sumatera krisis pasokan listrik.

Ancaman krisis listrik terjadi karena tujuh PLTA yang kekurangan air itu merupakan pemasok pada jaringan interkoneksi Sumatera bagian selatan (Sumbagsel) dan Sumatera bagian tengah (Sumbagteng).

Menurut Koordinator Operasi Sistem Interkoneksi PT PLN Sumbagsel dan Sumbagteng Mama Sumarna, akibat PLTA tidak berfungsi maksimal, produksi listrik di wilayahnya menurun sehingga daya pada jaringan listrik interkoneksi Sumbagsel dan Sumbagteng mengalami defisit.

"Penyusutan debit air pada tujuh PLTA akibat kemarau menyebabkan produksi listrik untuk Provinsi Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, dan Lampung berkurang," katanya kepada wartawan, Sabtu (1/7).

Di wilayah jaringan interkoneksi Sumbagsel dan Sumbagteng saat ini ada sembilan PLTA. Tiga di antaranya di Sumatera Barat (Sumbar), yaitu PLTA Maninjau, PLTA Singkarak, dan PLTA Batang Agam. Dua di Riau; PLTA Koto Panjang dan PLTA Talang Lembu. Dua di Bengkulu; PLTA Musi dan PLTA Tes. Dan dua lagi di Provinsi Lampung yaitu PLTA Way Besai dan PLTA Batu Tegi.

Mama menjelaskan, produksi PLTA saat kemarau akan berkurang sekitar 20% sampai 50%. PLTA Besai, misalnya, produksinya turun dari kapasitas 90 megawatt (Mw) menjadi 53 Mw, PLTA Batu Tegi dari kapasitas 2 x 14 Mw menurun menjadi 2 x 13 Mw, PLTA Koto Panjang dari 114 Mw menjadi 60 Mw, PLTA Singkarak dari 172 Mw menjadi 70 Mw, PLTA Maninjau dari 64 Mw menjadi 42 Mw, dan produksi PLTA Musi turun dari 210 Mw menjadi 140 Mw.

"Di PLTA Musi, salah satu mesinnya kini sedang dalam perbaikan. Jika selesai akan ada tambahan produksi sebesar 70 Mw yang masuk dalam jaringan interkoneksi Sumbagsel dan Sumbagteng," ujar Mama.

Kondisi listrik pada jaringan interkoneksi Sumbagsel dan Sumbagteng saat ini memiliki kemampuan terpasang 1.240 Mw dan pada beban puncak kebutuhannya mencapai 1.380 Mw. Berarti ada defisit 140 Mw.

#### Pemadaman bergilir

Berkurangnya pasokan listrik akan mulai dirasakan para pelanggan PT PLN di Sumbar pada awal bulan. Kemarin,

Humas PLN Wilayah Sumbar mengumumkan rencana pemadaman bergilir sejak awal bulan ini hingga awal Agustus. Sosialisasi pemadaman tersebut diumumkan pada sejumlah surat kabar lokal.

Dalam pengumuman disebutkan, pemadaman bergilir dilakukan akibat berkurangnya kapasitas produksi listrik yang dihasilkan di provinsi ini. Saat ini satu dari dua unit generator Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin, Sawahlunto, mengalami gangguan, sehingga tidak bisa berproduksi. Padahal, biasanya setiap generator di PLTU tersebut menghasilkan daya maksimal sebanyak 100 Mw.

Selain itu, pengurangan produksi listrik juga disebabkan menurunnya debit air di Danau Maninjau dan Danau Singkarak yang mendekati batas rawan operasi karena kemarau.

Humas PLN Wilayah Sumbar Yusman Rajo Mudo saat diminta konfirmasi, kemarin, tidak bisa dihubungi. Sedangkan Kepala PLN Cabang Padang Agusman Thaher tidak bersedia dimintai keterangan.

Pada pertengahan Juni Yusman kepada *Media Indonesia* pernah mengatakan, penurunan debit air di Danau Singkarak dan Maninjau mencapai satu meter sehingga membuat pembangkit di kedua PLTA tidak bisa bekerja maksimal. Salah satu cara untuk tetap menjaga pasokan listrik ialah dengan penghematan air yang mengakibatkan pemadaman bergilir. (*Media Indonesia*, 22/6)

Yusman mengatakan, penghematan perlu dilakukan sebab konsumen tidak bisa diajak berhemat. "Jika saja dalam satu malam masyarakat bisa menghemat 50 watt, dari 730.000 pelanggan akan terhemat sekitar 36,5 juta watt," ujar Yusman ketika itu.

Pemadaman digilir selama satu setengah sampai dua jam per hari dengan rasio satu berbanding empat. Artinya, dalam empat hari setiap wilayah mendapat jatah satu kali pemadaman.

Pemadaman listrik di Sumbar bukan yang pertama kali. Pada Juni 2004 PT PLN juga pernah melakukan pemadamatan bergilir yang merugikan masyarakat.

Selama ini, kebutuhan listrik di Sumbar dipasok dari PLTA Batang Agam dengan kapasitas 2 x 5 Mw, PLTA Maninjau 4 x 17 Mw, PLTA Singkarak 4 x 43 Mw, PLTU Ombilin 2 x 100 Mw, dan Pembangkit Listrik Tenaga gas Pauh Limo dengan kapasitas 2 x 17 Mw. (AY/HR/JN/N-1)

7.

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SEPUTAR INDONESIA
- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- TABLOID KONTAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH TRUST
- O

KODE:  LISTRIK  
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA  
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI  
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2006

## Pembangunan PLTU Bangko Ditunda

JAKARTA – Pemerintah menyatakan, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) mulut tambang Bangko Tengah berkapasitas 4x600 MW di Tanjung Enim, Sumatera Selatan senilai US\$ 2,6 miliar akan dibangun setelah 2009.

“Pemerintah saat ini hingga 2009 lebih memprioritaskan *crash program* PLTU 10.000 MW, setelah itu akan dibangun pembangkit 4x600 MW di Sumatera Selatan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro dalam dengar pendapat dengan Komisi VII DPR di Jakarta, pekan lalu.

Menurut Purnomo, PLTU berdaya besar tersebut masih tetap dalam rencana pemerintah dan listriknya akan dipasok ke Pulau Jawa pada tahun 2012. Namun, pemerintah tidak bisa memaksakan pembangunan PLTU Bangko Tengah sekarang, karena jika dipaksakan pasokan listrik di Sumatera akan kelebihan pasokan listrik pada 2009.

Hingga 2009 saja, pemerintah telah menargetkan percepatan pembangunan (*crash program*) PLTU di Sumatera lebih dari 1.500 MW, di antaranya PLTU Meulaboh 2x100-150 MW, PLTU Sibolga Baru 2x100-150 MW, PLTU Medan Baru 2x100-150 MW, PLTU Sumbang Pesisir Selatan 2x100-150 MW, dan PLTU Tarahan Baru 2x100-150 MW. Ada juga proyek pembangunan pembangkit kecil lainnya dan kerja sama PT PLN (Persero) dengan swasta (*independent producer power/IPP*) di Palembang Timur.

“Jadi, misalnya pembangkit PLTU Bangko Tengah dibangun sekarang juga tak bisa masuk ke Jawa 1-2 tahun dari sekarang, karena harus memakai kabel transmisi yang panjangnya 600 km dari Sumatera dan butuh teknologi sendiri. Karena itu, PLTU itu tidak masuk *crash program*,” katanya.

Menteri Negara BUMN Sugiharto mengatakan, kerja sama proyek PLTU Bangko Tengah dengan Guadian Engineering diteken di depan presiden ketika berkunjung ke Cina pada Juli tahun lalu. Saat ini, proses studi kelayakan (*feasibility study*) proyek tersebut masih terus didalami.

“Kami juga telah menunjuk *financial advisor*-nya. PLN, PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk (PTBA), dan Guadian sebagai investor juga sudah punya *road map*-nya. Tapi memang mustahil dilaksanakan sebelum 2009, karena listriknya harus diseberangkan ke Jawa, sementara PLN juga tak bisa sediakan dana sekarang,” katanya.

Menurut Sugiharto, pemerintah lebih memilih *crash program* pembangkit 10.000 MW agar kinerja PLN semakin membaik. BUMN kelistrikan tersebut tahun 2005 merugi terbesar Rp 4,9 triliun dari tahun sebelumnya sekitar Rp 2 triliun, karena sekitar 8.900 MW pembangkitnya masih menggunakan BBM dari 27.000 MW pembangkit yang ada.

“Karena itu, APBN juga dituntut menyediakan subsidi BBM hingga Rp 42 triliun. Kalau dibiarkan akan tetap seperti itu. Karena itu kita membutuhkan pembangkit berbahan bakar yang didukung sumber daya alam yang murah, yakni batu bara,” katanya. (lim)

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input checked="" type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> TABLOID KONTAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>	
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM
JAN FEB MAR APR MEI JUN <b>JUL</b> AGST SEPT OKT NOV DES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HALAMAN: 28		
TAHUN 2000		

# Masa Depan PLTN Indonesia

Oleh TOTOK SISWANTARA

*UNTUK* mencukupi kebutuhan energinya, berbagai negara telah menerapkan penggunaan energi nuklir lewat PLTN (Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir). Namun, bagi negara yang sedang berkembang, pembangunan PLTN mencuatkan resistensi yang serius. Selain menyangkut geopolitik global, masalah efisiensi, umur operasi dan tingkat keamanan masih menjadi faktor utamanya timbulnya resintansi. Apalagi pembangunan PLTN di Indonesia rencananya melalui skema pembiayaan yang sangat tergantung kepada pihak asing.

**L**EBIH mengkhawatirkan lagi jika sepuluh tahun pertama umur operasional PLTN konsesinya diberikan penuh kepada pihak asing. Setelah itu baru diserahkan dengan kondisi kinerja reaktor yang sudah menurun dan membutuhkan berbagai perawatan dan penggantian suku cadang. Itulah mengapa beberapa pakar berpendapat bahwa PLTN sama sekali tidak ekonomis dan tidak efisien. Selama ini keandalan PLTN tidak pernah mencapai 80 persen seperti yang direncanakan, tapi hanya 57 persen hingga 60 persen. Sebuah PLTN diharapkan dapat berfungsi sampai 30 tahun, meskipun secara teoretis bisa sampai 40 tahun.

Tetapi, dalam kenyataannya, reaktor di AS harus ditutup kurang dari 20 tahun. Hanya ada 5 buah yang masih berfungsi lebih dari 20 tahun. Sesudah 12 tahun, efisiensinya turun karena biaya operasional dan perbaikan meningkat, sementara risiko kecelakaan bertambah. Semakin tua reaktor, biaya operasional dan pengamanan akan semakin tinggi. Diperkirakan pengelolaan akan semakin tinggi setelah sekira 7 tahun. Pada saat itu pengelolaan beralih ke tangan pihak Indonesia. Ini berarti biaya operasional, perawatan, dan pengolahan limbah radioaktif akan semakin

melangit.

Menurut catatan sejarah pembangunan PLTN mulai banyak dilakukan oleh berbagai negara pada saat krisis minyak dunia akibat embargo negara Timur Tengah. Hingga tahun 2002 di seluruh dunia sudah didirikan sebanyak 438 buah PLTN dan sudah beroperasi menghasilkan daya listrik, serta puluhan lagi yang sedang dalam proses pembangunan. Negara-negara yang banyak memiliki PLTN antara lain adalah Amerika Serikat 104 buah, Prancis 59 buah, Jepang 53 buah, Inggris 35 buah, India 14 buah, Ukraina 13 buah serta Argentina, Meksiko, dan Brasil masing-masing memiliki 2 buah PLTN.

Energi nuklir telah membawa harapan banyak negara sebagai solusi untuk mengakhiri krisis energi. Namun bencana Chernobyl sempat membuat ragu umat manusia akan faktor keamanan sumber energi ini. Efisiensi yang dihasilkan energi nuklir memang terbukti sangat tinggi. Riset telah membuktikan bahwa hanya dengan 360 gram uranium sudah dapat mencukupi kebutuhan listrik untuk 1.000 rumah penduduk dalam waktu satu tahun. Akan tetapi risiko kebocoran reaktor nuklir juga terbukti cukup tinggi. Negara maju seperti Jepang yang terkenal akan budaya kedisiplinannya ternyata setiap tahunnya mengalami kebocoran pada reaktor nuklirnya.

Karena krisis listrik terus

mendera, bisa jadi bangsa Indonesia di kemudian hari akan menem-  
puh kebijakan teknologi nuklir se-  
bagai sumber energi alternatif.  
Apalagi praktisi nuklir Indonesia se-  
cara teknis sudah mampu dan siap  
mengoperasikan PLTN. Namun  
masalah geopolitik global bisa men-  
jadi rintangan berat seperti yang ter-  
jadi di Iran.

Kondisi krisis nuklir Iran yang  
saat ini sedang menghangat se-  
jatinya merupakan refleksi per-  
soalan bangsa Indonesia juga. Lebih-  
lebih harga BBM dunia terus melamb-  
bung dan harga listrik konvensional  
alpun semakin mahal. Adalah wa-  
jar jika suatu bangsa demi kelang-  
sungan hidupnya menempuh kebi-  
jakan energinya lewat pengayaan  
nuklir. Apalagi bangsa Iran dan ju-  
ga Indonesia memiliki tambang ura-  
nium yang cukup sebagai bahan  
dasar untuk mengoperasikan PLTN.

Bangsa Indonesia bisa memetik  
banyak hikmah dari krisis nuklir  
Iran dalam merancang *grand de-  
sign* sistem energi nasional jangka  
panjang. Selama ini Kebijakan En-  
ergi Nasional (KEN) masih belum  
tegas menggambarkan sebuah sis-  
tem yang mampu mencegah ter-  
jadinya krisis energi. Proyeksi dan  
potensi energi nasional belum diopti-  
malkan hingga bangsa Indonesia  
telah memasuki tahapan krisis en-  
ergi yang serius. Krisis energi secara  
riil akan menghadang bangsa In-  
donesia mulai tahun 2011 dimana  
pada saat itu akan ditandai dengan

defisit ekspor-impor energi dalam  
jumlah yang besar.

Oleh sebab itu bangsa Indonesia  
mulai sekarang perlu merumuskan  
strategi yang jitu. Strategi tersebut  
tentu dengan mengintegrasikan ser-  
ta mengoptimalkan potensi ca-  
dangan sumber-sumber energi yang  
masih dimiliki. Dalam konteks so-  
lusi krisis energi beberapa pihak  
telah mengemukakan pentingnya  
segera mengoperasikan PLTN.  
Bahkan Badan Tenaga Nuklir Na-  
sional (Batn) berpendapat bahwa  
bangsa Indonesia untuk kedepan  
minimum membutuhkan pemban-  
gungan empat buah PLTN guna  
memenuhi 1,9 persen pasokan listrik  
atau setara dengan 4.000 megawatt.

Rencana ini mengacu pada ren-  
cana umum ketenagalistrikan In-  
donesia. Karena porsi PLTN 4.000  
megawatt, maka butuh 4 buah PLTN  
karena pada tahun 2025 Indonesia  
membutuhkan 100 gigawatt daya  
listrik. *Milestone* target pemban-  
gungan PLTN selama ini selalu ten-  
tative. Terakhir Kepala Batan me-  
nyebutkan bahwa tahun 2006 diha-  
rapkan izin papak (tempat) sudah  
didapatkan. Tahun 2008 ditender-  
kan, tahun 2010 dibangun, dan ta-  
hun 2016 sudah mampu beroperasi.  
Namun kenyataannya *milestone*  
tersebut berjalan tersendat-sendat  
bahkan stagnan disana-sini.\*\*\*

*Penulis, pemerhati masalah  
transformasi industri dan teknolo-  
gi, tinggal di Cimahi.*

MONITOR BERITA

<input checked="" type="checkbox"/> BISNIS INDONESIA <input type="checkbox"/> INVESTOR DAILY <input type="checkbox"/> KOMPAS <input type="checkbox"/> KORAN TEMPO <input type="checkbox"/> MEDIA INDONESIA <input type="checkbox"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="checkbox"/> RAKYAT MERDEKA <input type="checkbox"/> REPUBLIKA <input type="checkbox"/> SUARA KARYA	<input type="checkbox"/> SEPUTAR INDONESIA <input type="checkbox"/> SUARA PEMBARUAN <input type="checkbox"/> SINAR HARAPAN <input type="checkbox"/> TABLOID KONTAN <input type="checkbox"/> THE JAKARTA POST <input type="checkbox"/> MAJALAH GATRA <input type="checkbox"/> MAJALAH TEMPO <input type="checkbox"/> MAJALAH TRUST <input type="checkbox"/>										
KODE: <input checked="" type="checkbox"/> LISTRIK <input type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	<b>JUL</b>	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	TAHUN 2006								
HALAMAN: T. 5											

# 'Bodoh banget kalau berikan cash collateral

BISNIS INDONESIA

JAKARTA: Proyek pembangkit pembangkitan PLTA berkapasitas 10.000 MW mulai bergejolak, berbagai persiapan telah dilakukan oleh PT PLN maupun departemen teknis.

Namun, persoalan utama dari proyek tersebut adalah mencari pendanaan US\$5,7 miliar. Bagaimana rencana PT PLN mendapatkan dana, berikut petikan wawancara dengan Direktur Keuangan PT PLN Parno Isworo.

**Anda menyampaikan di hadapan Komisi VII DPR jika PLN menempatkan pemerintah sebagai pihak yang harus menanggung semua risiko pinjaman jika proyek gagal?**

Itu terlalu jauh, kita belum sampai ke sana. Saya hanya katakan *fallback* ditanggung pemerintah *if all else fail*, itu skenario terburuk, tapi Anda tidak perlu menulis itu. *We are not going to that scheme* karena kita punya dua UU yang melindungi PT PLN, kita punya pemerintah yang konsisten dan parlemen yang konsisten.

Jadi bagaimana sebenarnya skema pendanaan yang akan digunakan oleh PLN, sebab untuk mendapatkan pinjaman akan sulit mengingat PLN merugi Rp4,9 triliun pada 2005?

Kita mau mandiri, kita keluarkan obligasi dan dapat Rp2,4 triliun, itu tidak menggunakan jaminan pemerintah. Kami berusaha tegakkan perusahaan ini seperti layaknya perusahaan swasta.

Kalian terlalu simpel kalau melihatnya dari laba dan rugi, yang dilihat adalah berapa adanya dana *cash* di tangan. Untuk itu ukurannya EBITDA (*earning before interest and taxes*) atau laba operasi atau laba usaha ditambah penyusutan.

Sebelum krisis EBITDA, kita pernah capai US\$1,6 miliar, tapi perusahaan ini pernah terpuruk pada 1999, EBITDA negatif US\$320 juta ekuivalen. Tapi pada 2004 kita pulih dengan EBITDA US\$1,5 miliar ekuivalen plus dengan kenaikan TDL (tarif dasar listrik) yang bertahap, karena itu investor mulai percaya.

Kepercayaan ini kita bawa terus dan kita tidak pernah gagal di pasar modal, pasar modal tidak pernah terlalu *care* dengan *bottomline*, yang

penting *cash*-nya ada berapa.

**Apa strategi yang sebenarnya ingin digunakan oleh PLN?**

Kalau kita pinjam uang terutama dari dana internasional, mereka minta kita jamin pembayarannya biasanya dalam bentuk *letter of credit* (L/C).

Kewajiban kita, menurut peraturan perbankan di Indonesia, kalau mau membuka L/C maka harus dikasih *cash collateral*. Itu artinya saya bodoh banget kalau mau memberikan *cash collateral*. Masak duitnya diberhentikan di situ, dari pada kita *cash collateral*, lebih baik saya bayar tunai saja, tapi tidak bisa bayar tunai karena memang pinjaman.

Jadi sekarang bagaimana caranya menurunkan biaya *cash collateral* tadi karena itu peraturan BI.

PLN punya dua UU yaitu UU No. 15/1985 di mana ada ketentuan tarif ditetapkan pemerintah. Tapi kalau tarifnya terlalu rendah, maka UU BUMN Pasal 66 yang memberikan kewajiban kepada pemerintah kalau tarif lebih rendah dari harga pokok



Parno Isworo

maka pemerintah harus menyediakan subsidi dalam bentuk *public service obligation (PSO)*.

Karena ada dua *PSO* ini, maka para investor di infrastruktur ketenagalistrikan merasa *comfortable*, merasa enak tanpa *government guarantee*.

#### **Bisa dijelaskan lebih lanjut?**

Kita punya bukti, pada 2004 harga solar Rp1.650/liter, kita dapat subsidi Rp3,5 triliun, begitu harga solar naik bertahap hingga Rp4.700/liter, PLN dapat Rp12,5 triliun, kemudian tahun ini sekitar Rp27 triliun lebih.

Hal itu bukti konsistensi dari pemerintah terhadap perusahaan listriknya, sehingga tidak perlu sebetulnya *government guarantee* dan itu kelihatan saat pembangunan PLTU Cirebon yang tidak membutuhkan *government guarantee*.

PLTU Cirebon hanya 1x600 MW butuh dana sedikit, berbeda dengan PLTU *crash program* hingga 10.000 MW yang butuh dana tidak sedikit, investor tentunya perlu kepastian kreditnya dapat dikembalikan.

**Jadi Anda optimistis pem-**

#### **bangunan PLTU 10.000 MW?**

Jangan bayangkan 10.000 MW dalam satu kontrak. Bayangkan *side demi side*, *financeable* *kan*. Kita tidak akan melakukan langsung 10.000 MW karena efeknya dalam pasar modal *crowding out*, kita membanjiri dengan *demand* yang terlalu besar. Pemerintah hanya keuarkan SUN hanya Rp3 triliun, kalau 10.000 langsung dicarikan dananya, maka kebutuhannya sekitar US\$8 miliar.

Kalau 15% harus dicukupi pemerintah maka pasar modal akan dipenuhi permintaan sebesar US\$1,2 miliar atau sekitar Rp12 triliun itu *crowding out*. Biasanya Rp3 triliun terus sekarang mau Rp12 triliun, kaget pasar modalnya. Kalau pasar modal kaget, dampaknya cuma satu yaitu mahal untuk Indonesia dan kita mau *avoid* itu.

Kita *planning* semuanya, kita sudah punya *advisor*, *underwriter*, dan kami lagi kerja sekarang. Pertama kali kerja *get rated*, PLN nanti memiliki *corporate rating international*. Yang akan *rate* adalah S&P dan Moody's. Kita akan *kick off* sekitar dua tiga hari.

Pewawancara: BAMBANG D. DIJANUARTO